

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas dan Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Amos, Abraham H. F., 2007, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmara, Galang, 2005, *Ombudsman Republik Indonesia Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Asmara, Galang, 2006, *Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, dkk, 2016, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Malang
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Astarini, Dwi Rezki Sri, 2013, *Mediasi Pengadilan, Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Alumni, Bandung
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesembilan, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1992, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Barata, Atep Adya, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima, Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Batten, Donna (ed), 2010, *Gale Encyclopedia of American Law*, 3rd edition, Farmington Hill Gale Cengage Learning
- Boediono, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Brouwer, J.G., dan A.E. Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen.
- Budiardjo, Miriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Cruz, Peter de, 1999, *Comparative Law in Changing The World*, Cavendish Publishing Ltd, London/Sydney.
- Daim, Nuryanto A., 2014, *Hukum Administrasi: Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Dainow, Joseph (ed.), 1974, *The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and Mixed Jurisdictions*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, LA.
- Dwiyanto, Agus et al., 2007, *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PSKK UGM bekerja sama dengan Kemitraan, Yogyakarta.

- Dwiyanto, Agus, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta
- Estiningsih, Muji, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Frahm, M., 2013, *Australasia and Pacific Ombudsman Institutions*, International Ombudsman Institute (ed), Springer, Berlin Heidelberg.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S., 1998, *Renungan Hukum, untuk Kalangan Sendiri*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Garner, Bryan A., (ed), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, St. Paul, Thomson West,
- Gijssels, JaN, 1982, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Atwerpen, Terjemahan terhadap tulisan ini dapat dirujuk dalam Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Goopaster, Gary, 1995, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. , 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M. et.al., 2012, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti

Hakim, Abdul Aziz, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamburger, Philip, 2008, *Law and Judiciary Duty*, Cambridge, Harvard University Press

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Hartono, Sunarti, "Metode Penyusunan Ombudsprudence," dalam Ombudsman, 2009, *Ombudsprudence*, Ombudsman, Jakarta.

Hartono, Sunaryati et al., 2003. *Panduan Investigasi untuk Indonesia*, The Asia Foundation Indonesia, Jakarta.

HR, Ridwan, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Korpershoek, Linda, 2013, *Ombudsprudentie in de Rechtszaal*, Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Open Universiteit, Valkenburgerweg.

Kusnardi, Moh., and Harmaily Ibrahim, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2012, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*,

Alumni, Bandung.

Lotulung, Paulus Efendi, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Cetakan Pertama, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta.

Mahkamah Agung, 2005, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Mahkamah Agung, Jakarta

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenamedia Group, Jakarta.

Mas'udi, Masdar F., "Ombudsman Melawan Positivisme Hukum demi Good Governance dan Keadilan", dalam C. F. G Sunaryati Hartono (ed.), 2005, *Peranan Ombudsman dalam Rangka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Masthuri, Budhi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mertokusomo, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Meulenbroek, 2010, "Betere Bescherming Tegen de Overheid: Hoe de Ombudsman in Nederland zijn Intrede Deed," in M. Laemers & A. Brenninkmeijer (red.),

Visies op klachtrech Eerste lustrumbundel Vereniging voor Klachtrecht, Sdu
Uitgevers, Den Haag

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Ombudsman, 2009, *Ombudsprudence*, Ombudsman, Jakarta.

Pane, Nina, 2012, *Adnan Buyung Nasution: Nasihat untuk SBY*, Kompas, Jakarta

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

- Peter, A.A.A., dan Koesriani Siswosebroto, “Hukum dan Perkembangan Hukum,” dalam Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds., 1998, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pontier, J.A., *Rechtsvinding*, diterjemahkan B. Arief Sidharta, 1995, Ars Aequi Libri, Nijmegen.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1980, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Ratminto dan Atik Septi W, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso, dan Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Setiono, 2010, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2014, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasia, 2002, *Bentuk ADR dan Prinsip-Prinsip Mediasi*, USU Press, Medan,
- Sirajuddin dkk., 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.
- Situmorang, Viktor M dan Yusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Stolk, P.J., 1991, *De Nationale Ombudsman*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

Sujanto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujata, Antonius, 2002, *Ombudsman Indonesia; Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta

Surachman, RM., "Ombudsman dan Upaya Memberantas Korupsi di Berbagai Negara" dalam C. F. G Sunaryati Hartono (ed.), *Peranan Ombudsman dalam Rangka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2005.

Swastha, Basu, 1985, *Asas-asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta.

Syafrudin, Ateng, 1982, *Memantapkan Pemerintah yang Bersih Kuat dan Berwibawa*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Tamanaha, Brian Z., 2006, *On the Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge.

Thamrin, Husni, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Penerbit Universitas

Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi*

Indonesia, Cetakan Kesembilan, Ichtiar Baru, Jakarta.

Vlugt, M. van der, 2011, *De Nationale Ombudsman en Behoorlijk Politieoptreden*

(Diss. Leiden), Boom Lemma Uitgevers, Den Haag

Wheare, K.C., 1933, *Maladministration and its Remedies*, Stevens & Sons

Publication, London.

Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penerimaan,

Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Ombudsman Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.

Jurnal dan Makalah

Adam, Siti Megadianty dan Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya,”

Buletin Musyawarah, No. 1, no. I, 1997, Indonesian Center for Environmental Law, Jakarta.

Ayeni, Victor O., “Ombudsmen as Human Rights Institutions: The New Face of a Global Expansion” makalah yang disampaikan pada *Workshop 1: The Ombudsman as Human Rights Defender*, Wednesday, 10 Juni 2009.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 1, no. 2, Agustus 2018.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, “Penyelesaian Sengketa di Ombudsman dan di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 2, no. 2, Agustus 2019.

Daim, Nuryanto A dkk., “Urgensi Penerapan Ombudsprudensi dalam Penyelesaian Maladministrasi pada Kasus Sejenis yang Terjadi Kemudian,” *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, no. 1, April 2022.

Dewi, Dyah Adriantini Sintha, Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Maladministrasi oleh Ombudsman dalam *Jurnal Hukum dan Dinamika*

Masyarakat, Vol. 11, no. 2, April 2014.

Fon, Vincy, and Francesco Farisi, “Judicial Precedent in Civil Law Systems: A Dynamic analysis”, *International Review of Law and Economics*, Elsevier, Vol. 26, 2006.

Goodhart, Arthur L., “Determining The Ratio Decidendi of a Case”, *Yale Law Journal*, Vol. XL, no. 2, December 1930.

Hartono, Soenaryati, “Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum,” Makalah disampaikan pada *Seminar tentang Peranan Hakim dan Tanggung Jawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia*, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober 2002.

Huda, Miftakhul, “Yurisprudensi,” *Majalah Konstitusi*, Edisi April 2010.

International Lecture of Sabastian Pompe, “Praktik Yurisprudensi di Negara Civil Law” dalam *Seminar Mendorong Konsistensi Putusan: Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini* di Jentera School of Law, Jakarta Selatan, Senin 5 Maret 2012.

Kirkham, R., “Ombudsman Section Implementing the Recommendations of an Ombudsman . . . Again”, *Journal of Social Welfare & Family Law*, Vol. 33, no. 1, Maret 2011.

Langbroek, Philip M., and Peter Rijpkema, “Demands of proper administrative conduct A research project into the ombudsprudence of the Dutch National Ombudsman,” *Utrecht Law Review*, Vol. 2, no. 2, December 2006.

Nurdin, “Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman sebagai Bentuk Pengawasan

terhadap Pelayanan Publik,” *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, no. 2, Juli 2021.

Simanjuntak, Enrico, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia,”

Jurnal Konstitusi, Vol. 16, no. 1, Maret 2019.

Suhartono, Slamet, “Penggunaan Alternatif Dispute Resolution dalam Penyelesaian

Sengketa antara Masyarakat dengan Pemerintah,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7

no. 14, Agustus 2011.

Sujata, Antonius, “Peran Ombudsman dalam Mewujudkan Good Governance,”

Makalah yang disampaikan dalam Seminar Otonomi Daerah dan Urgensi

Pembentukan Ombudsman Daerah, Kerjasama KON, CO of Australia, dan

PUSHAM UII, Yogyakarta, 24 Juni 2004.

Sukrino, Didik, “Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan

Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia,”

Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, no. 2, 2014.

Penelitian

Cahyana, Asep, 2022, *Analisis Multiple Streams Approach Terhadap Penghambat*

Agenda Kebijakan Ganti Rugi Pelayanan Publik di Indonesia, Tesis,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nuriyanto, 2017, *Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Dalam Penyelesaian*

Maladministrasi Pelayanan Publik, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945

Surabaya.

Riyanto, Benny, 2006, *Kebebasan Hakim dalam Menutus Perkara Perdata di*

Pengadilan Negeri, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang.

Setiawan, Adam, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Internet

Dalu, Dominikus, 4 September 2018, "Ajudikasi Khusus Ombudsman VS Komitmen Pelayanan Publik,"

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ajudikasi-khusus-ombudsman-vs-komitmen-pelayanan-publik>, diakses 18 April 2023.

De Nationale Ombudsman, 2017, "Rapport No. 2017/078,"

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/2017_078.pdf,
diunduh 15 Mei 2023.

Dewi, Ratna Sari, 2019, "Mengenal Ombudsprudence,"

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-ombudsprudence>,
diakses 27 Desember 2022.

Ombudsman RI, 2020, "Laporan Tahun 2020",

https://ombudsman.go.id/produk/lihat/573/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20210226_140136.pdf, diunduh pada 10 Maret 2023

Ombudsman RI, 2021, "Laporan Tahun 2021",

https://ombudsman.go.id/produk/lihat/673/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20220401_110804.pdf, diunduh pada 10 Maret 2023

Ombudsman RI, 2022 "Laporan Tahun 2022",

https://ombudsman.go.id/produk/lihat/754/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20220401_110804.pdf

230331_151307.pdf, diunduh pada 10 Maret 2023

Ombudsman RI, n.d., “Produk Rekomendasi Ombudsman,”

<https://ombudsman.go.id/produk?c=16&s=16>, diakses 26 Maret 2023.

Simanjuntak, Enrico, 27 Agustus 2018, “Potensi Persinggungan Kewenangan

Ombudsman dengan Badan Peradilan,”

[https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-persinggungan-kewenangan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-persinggungan-kewenangan-ombudsman-dengan-badan-peradilan-1t5b83a09e9f6e0/?page=2)

[ombudsman-dengan-badan-peradilan-1t5b83a09e9f6e0/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-persinggungan-kewenangan-ombudsman-dengan-badan-peradilan-1t5b83a09e9f6e0/?page=2), diakses 18

April 2023.

USLegal, n.d., “Binding Precedent Law and Legal Definition”,

<https://definitions.uslegal.com/b/binding-precedent/>, diakses 15 April 2023.

USLegal, n.d., “Persuasive Precedent Law and Legal Definition”,

<https://definitions.uslegal.com/b/binding-precedent/>, diakses 15 April 2023.

Dokumen lainnya

Risalah Rapat Panja RUU tentang Ombudsman RI antara Komisi III DPR RI dan

Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, 31 Januari 2007.

Risalah Rapat Pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik pada Rapat Tim

Sinkronisasi antara DPR dengan Kementerian PAN RI Dan Kementerian

Hukum dan HAM RI di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI,

Jakarta, 6 Mei 2009.